

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PAYAKUMBUH

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, kita telah diberi kekuatan dan kemampuan dalam mengemban tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai wujud pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara dengan berpijak pada asas transparansi dan akuntabel.

Sebagai wujud dari asas transparansi dan akuntabel tersebut, segala sesuatu yang telah kita laksanakan dalam rangka menjalankan Program Kegiatan Pembangunan, sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh wajib untuk dievaluasi dan dilaporkan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sebagai tolak ukur untuk menilai sejauh mana optimalisasi kinerja pembangunan yang sudah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan. Laporan kinerja ini sekaligus merupakan bahan evaluasi dari pelaksanaan visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 dapat kami selesaikan, masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LKjIP ini semoga Laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaannya, terimakasih.

Payakumbuh, 26 Januari 2023

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PAYAKUMBUH



Dipa Surya Persada, S.STP, MM
830208 200112 1 002

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar isi..... | ii |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Tugas Pokok dan fungsi..... | 2 |
| C. Struktur Organisasi..... | 3 |
| D. Isu Strategis..... | 4 |
| E. Landasan Hukum..... | 5 |
| F. Sistematika Penyajian..... | 6 |
| | |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA | |
| A. Rencana Strategis | 7 |
| B. Indikator Kinerja Utama..... | 11 |
| C. Perjanjian Kinerja 2022..... | 12 |
| | |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. Capaian Kinerja Organisasi..... | 13 |
| B. Realisasi Anggaran..... | 38 |
| | |
| BAB IV. PENUTUP..... | 40 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk sistem pertanggungjawaban yang terukur atas kinerja setiap instansi pemerintahan sebagaimana disebutkan diatas, karena konsep dasar dari akuntabilitas itu adalah sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Payakumbuh mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, sudah ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta didukung oleh berbagai kebijakan yang terukur. Tujuan dan Sasaran tersebut menjadi pokok utama yang diuraikan dan dijelaskan secara sistematis dalam Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022.

Sebagai salah satu instansi yang berperan dalam pembinaan dan pengembangan Kesatuan Bangsa dan Politik masyarakat, maka tujuan dan sasaran yang ditetapkan harus mampu mengakomodir beragam kepentingan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, untuk pelaksanaan tugas pokok Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan, yakni:

Perumusan Kebijakan teknis dibidang ideologi, kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dan pembinaan masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2022, upaya pencapaian tujuan dan sasaran dilaksanakan dalam 5 Program, 10 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan Pembangunan dengan dukungan anggaran Rp 3.997.905.677.-(*tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah*). Dalam pelaksanaan program dan kegiatan banyak hal-hal yang bisa menjadi nilai tambah bagi terwujudnya tujuan yang akan dicapai. Dalam berbagai kendala dan keterbatasan yang ada serta memperhatikan faktor-faktor penentu yang memberi konstribusi positif bagi upaya pencapaian tujuan dan sasaran, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 cukup berhasil dengan capaian fisik kegiatan mencapai 100% dengan kinerja keuangannya 94,53% .

Capaian tersebut menunjukkan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik cukup terjaga konsistensinya. Hal ini didasari oleh evaluasi yang dilakukan secara terus menerus, yang berhasil ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang maksimal.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok adalah membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi perencanaan, perumusan Kebijakan, menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengevaluasi kebijakan kesatuan bangsa dan politik.

2. Fungsi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan fungsi sebagai berikut

:

- ✓ Perumusan Kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik
- ✓ Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan Bangsa dan Politik.
- ✓ Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang kesatuan Bangsa dan Politik.
- ✓ Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

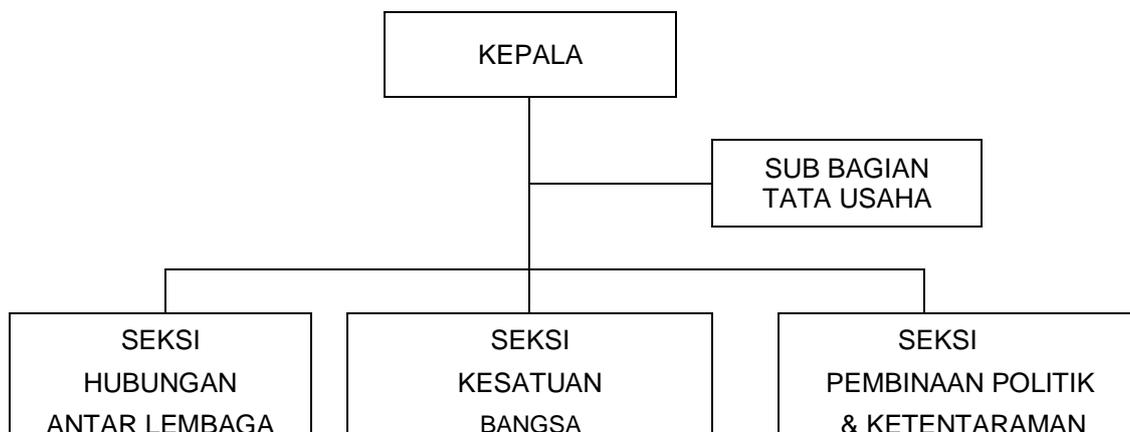
C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016, Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh terdiri dari :

- KEPALA KANTOR
- KASUBAG TATA USAHA (KTU)
- KASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA (KASI HAL)
- KASI KESATUAN BANGSA (KASI KESBANG)
- KASI PEMBINAAN POLITIK DAN KETENTRAMAN (KASI PPK)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan struktur organisasai di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PAYAKUMBUH



Sesuai dengan uraian Struktur Organisasi tersebut diatas , formasi jabatan tingkat eselon terdiri dari :

| No | ESSELON | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|---------|--------|-------------------|
| 1 | III / a | 1 | Kepala Kantor |
| 2 | IV / a | 4 | KTU dan Kasi-Kasi |

D. ISU STRATEGIS

Sebagai komponen pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berperan dalam pembinaan bidang kesatuan bangsa dan politik, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dihadapkan pada tantangan-tantangan yang tidak ringan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Kondisi ini pada dasarnya terdiri dari sejumlah faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor penghambat pelaksanaan tupoksi, namun demikian terdapat juga faktor strategis yang dimiliki kantor kesatuan bangsa dan politik dimana terdapat juga faktor positif didalamnya yang diidentifikasi sebagai kekuatan yang signifikan mampu mendorong peningkatan kinerja.

Kondisi daerah yang aman dan kondusif menjadi prasyarat utama pelaksanaan pembangunan daerah, oleh karena itu penciptaan kondisi daerah yang aman, tertib, dan tenteram menjadi isu utama pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah:

1. Masih adanya potensi konflik sosial di tengah masyarakat;
2. Rendahnya peran partai politik dan ormas dalam kehidupan berdemokrasi di Kota Payakumbuh;
3. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh.

E. LANDASAN HUKUM

LKjIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh ini mengkomunikasikan Pencapaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh selama tahun 2022. Sistematis Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kesatuan dan Politik Kota payakumbuh Tahun 2022 adalah :

I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Latar belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Isi Strategis, Dasar Hukum dan berisikan Tentang Sistematis Penyajian.

II. PERENCANAAN KINERJA

Meliputi ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2022.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran dan Capaian Prestasi serta Penghargaan.

IV. PENUTUP

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh. Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh merupakan hasil kesepakatan

bersama antara Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022 adalah : **“Terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Payakumbuh yang demokratis, partisipatif, beradab, tertib, aman dan harmonis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat menuju kehidupan yang demokratis;
- b. Menciptakan stabilitas daerah yang kondusif.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh

| No | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN | | | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN | | | KET |
|-----|--|--|--|----------------------------------|--------|--------|-------------------------------|--------|--------|------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan di bidang kesatuan bangsa dan politik | Menurunnya tingkat konflik sosial di tengah masyarakat | Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat | 100% | 95% | 95% | - | - | - | IKU |
| | | | Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat | - | - | - | 100% | 100% | 100% | |
| | | Meningkatnya peran parpol dan ormas dalam kehidupan berdemokrasi | Persentase parpol dan ormas yang aktif | 88,89% | 84,78% | 86,27% | - | - | - | IKU |
| | | | Persentase parpol dan ormas yang aktif | - | - | - | 90,64% | 90,64% | 90,64% | |

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Nomor : 200/16/Kesbangpol/PYK/2021 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN | | |
|----|--|---|--------|---|--|-------------|
| | | | | ALASAN | FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN | SUMBER DATA |
| 1 | Menurunnya tingkat konflik sosial di tengah masyarakat | Persentase penanganan konflik yang terjadi di tengah masyarakat | % | Amanat Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di daerah | Jumlah penanganan konflik/jumlah konflik yang ada x 100% | Kesbangpol |
| 2 | Meningkatnya peran parpol dan ormas dalam kehidupan berdemokrasi | Persentase parpol dan ormas yang aktif | % | Amanat Permendagri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol | Jumlah parpol dan ormas yang aktif / jumlah parpol dan ormas yang ada x 100% | Kesbangpol |

C. Perjanjian Kinerja 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2022 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh

Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|--|--------|
| 1 | Menurunnya tingkat konflik sosial di tengah masyarakat | Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat | 100% |
| 2 | Meningkatnya peran parpol dan ormas dalam kehidupan berdemokrasi | Persentase parpol dan ormas yang aktif | 90,64% |
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja kantor kesbangpol | Hasil Penilaian AKIP Kesbangpol oleh Inspektorat | A |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

| Persentase | Predikat | Kode Warna |
|------------|-------------------------|------------|
| < 100% | Tidak Tercapai | |
| = 100% | Tercapai/ Sesuai Target | |
| > 100% | Melebihi Target | |

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

| NO. | Kategori | Rata-Rata % Capaian | Kode Warna |
|-----|---------------|---------------------|------------|
| 1 | Sangat Baik | > 90 | |
| 2 | Baik | 75.00 – 89.99 | |
| 3 | Cukup | 65.00 – 74.99 | |
| 4 | Kurang | 50.00 – 64.99 | |
| 5 | Sangat Kurang | 0 – 49.99 | |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama SKPD dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Nomor : 200/16/Kesbangpol/PYK/2021 Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022.

Tabel 3.1
**Capaian Indikator Kinerja
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2022**

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
|-----|--|--------|--------|-----------|-----------|
| 1 | Persentase Penanganan Konflik Sosial yang Terjadi di Tengah Masyarakat | % | 100,00 | 100% | 100% |
| 2 | Persentase Parpol dan Ormas yang Aktif | % | 90,64 | 90,90% | 100,29% |
| 3 | Hasil Penilaian AKIP Kesbangpol oleh Inspektorat | nilai | A | A | 100% |

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kesbangpol sesuai target ditunjukkan pada indikator Persentase Penanganan Konflik Sosial yang terjadi di Tengah Masyarakat dengan capaian kinerja 100%, pada indikator Persentase Parpol dan

Ormas yang Aktif dengan capaian kinerja 100,29% dan pada indikator Hasil Penilaian AKIP Kesbangpol oleh Inspektorat dengan capaian kinerja 100%.

Secara umum Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 sebanyak 3 (tiga) sasaran.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2022

| NO. | SASARAN STRATEGIS | CAPAIAN |
|-----|--|----------|
| 1 | Menurunnya tingkat konflik sosial di tengah masyarakat | 100 % |
| 2 | Meningkatnya peran parpol dan ormas dalam kehidupan berdemokrasi | 100,29 % |
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja kantor kesbangpol | 100 % |

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 3 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Menurunnya Tingkat Konflik Sosial di Tengah Masyarakat

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Menurunkan Tingkat Konflik Sosial di Tengah Masyarakat

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2021 | | % | Tahun 2022 | | % | Akhir RPJMD | |
|---------------------------|--|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|-------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi |
| 1 | Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | | | 100,00 | | | 100,00 | | 100,00 |

Sasaran Menurunkan Tingkat Konflik Sosial di Tengah Masyarakat dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Konflik sosial yang terjadi pada tahun 2022 di Kota Payakumbuh sebanyak 7 yaitu :

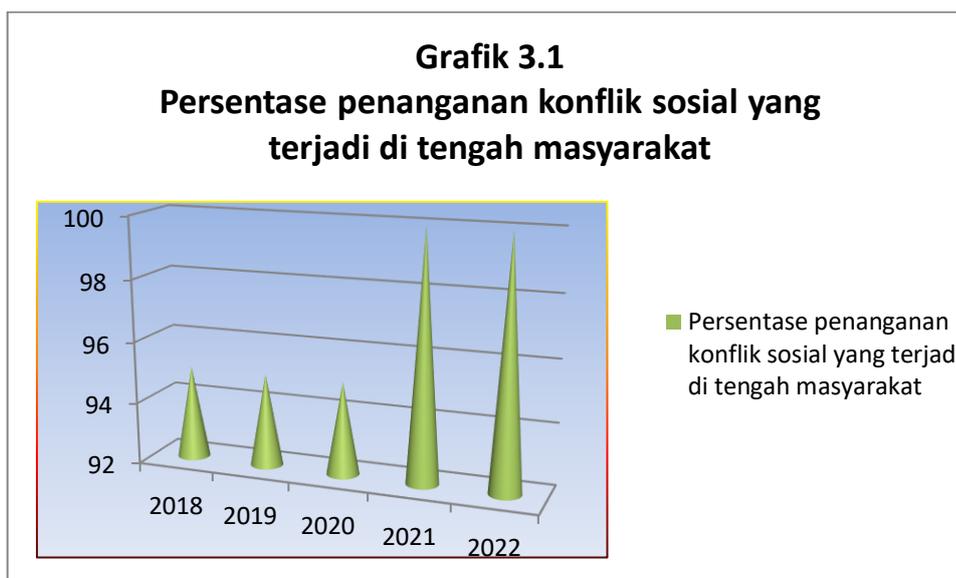
1. Kasus penularan Covid-19 masih ada di Kecamatan Payakumbuh Barat yang positif 2 orang yaitu di Kelurahan Ibh;
2. Pergantian kepengurusan Mesjid Nurul Islam yang ada di Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat yang belum ada titik terang;
3. Tawuran antar pelajar sekolah yaitu SMK N 2 Payakumbuh dan SMK Mitra Payakumbuh;
4. Persiapan memasuki bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri;
5. Masalah Virus dan Penanganan Kasus PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) pada hewan ternak menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha di Kota Payakumbuh;
6. Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM);
7. Persiapan malam natal dan tahun baru.

Dari 7 (tujuh) Potensi Konflik Sosial yang terjadi tersebut dapat diselesaikan 7 (tujuh) konflik dengan cara koordinasi, kerja sama dan monitoring yang dilakukan tim Penanganan Konflik Sosial Kota Payakumbuh tahun 2022 yang dituangkan dalam Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 200.3/54/WK-PYK-2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2022 sehingga capaian kinerja indikator Persentase penanganan konflik yang terjadi di tengah masyarakat adalah $(7 \times 100\%) / 7 = 100\%$ dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau sesuai dengan target yang diperjanjikan. Capaian ini sama dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu 100% yang dapat kita lihat pada tabel 3.3, sudah secara maksimal tercapai.

Untuk perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.4
 Persentase Penanganan Konflik yang Terjadi di Tengah Masyarakat Tahun 2018 – 2022

| Indikator Kinerja Utama | TAHUN | | | | |
|---|--------|--------|--------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase penanganan konflik yang terjadi di tengah masyarakat | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 100,00% | 100,00% |



Capaian kinerja sasaran Menurunkan Tingkat Konflik Sosial Masyarakat didukung oleh Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan 1 buah sub kegiatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan 1 buah sub kegiatan dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan 3 buah sub kegiatan.

Gambaran tentang program, kegiatan, sub kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Program, kegiatan, sub kegiatan, anggaran dan output yang dihasilkan

| No | Program/Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Output | Menujang /Kurang |
|-----|--|--------------------|-------------------------|---|------------------|
| I | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 125.018.650 | 123.977.480 | | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi pancasila dan Karakter Kebangsaan | 125.018.650 | 123.977.480 | | |
| 1 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 125.018.650 | 123.977.480 | Jumlah sosialisasi, Forum Pembauran dan Bela Negara yang dilaksanakan | Menunjang |
| II | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 245.807.740 | 232.923.310 | | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 245.807.740 | 232.923.310 | | |
| 1 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 245.807.740 | 232.923.310 | Jumlah rapat tim FKUB, narkoba dan pakem ; Jumlah sosialisasi narkoba dan pakem | Menunjang |
| III | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | 684.210.550 | 670.159.489 | | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 684.210.550 | 670.159.489 | | |
| 1 | Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, | 176.523.330 | 168.126.250 | Jumlah rapat tim penanganan konflik sosial, fasiltasi ormas, | Menunjang |

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------|
| | Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah | | | pengamanan lebaran dan akhir tahun | |
| 2 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah | 153.452.620 | 153.156.160 | Jumlah rapat tim FKDM dan FKDD | Menunjang |
| 3 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 354.234.600 | 348.877.079 | Jumlah fasilitas kegiatan forkopimda | |

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran menurunkan tingkat konflik sosial masyarakat disebabkan faktor pendukung sebagai berikut :

- 1 . Tim Penanganan Konflik Sosial Kota Payakumbuh bekerja secara maksimal dalam rangka meredam konflik di tengah-tengah masyarakat.
- 2 . Terjadinya kemitraan yang baik antara pemerintah, TNI/Polri dan anggota masyarakat Kota Payakumbuh.

Faktor penghambat kinerja sasaran menurunkan tingkat konflik sosial masyarakat disebabkan faktor pendukung sebagai berikut :

- 1 . Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku.
- 2 . Tingginya tingkat pemicu konflik sosial di tengah-tengah masyarakat.

Permasalahan ini dapat diatasi semaksimal mungkin dengan cara melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan instansi vertikal lainnya.



LOMBA CERDAS CERMAT BELA NEGARA



BIMTEK BELA NEGARA



TIM TERPADU PENGAMANAN AKHIR TAHUN

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Menurunkan Tingkat Konflik Sosial Masyarakat, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Menurunkan Tingkat Konflik Sosial di Tengah Masyarakat

| No | Sasaran | Indikator | Satuan | Kinerja | | | Keuangan | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|---------|-----------|--------|---------------|---|--|-------------|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | Target | Realisasi | (%) | Program | Pagu | Realisasi | % | | | | | |
| 1 | Menurunkan Tingkat Konflik Sosial di Tengah Masyarakat | 1.1 | Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 125.018.650 | 123.977.480 | 99,17 | | | |
| | | | | | | | | 2 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 245.807.740 | 232.923.310 | 94,76 | | | |
| | | | | | | | | 3 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | 684.210.550 | 670.159.489 | 97,95 | | | |
| | | | | | | | | RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR | | | 100,00 | TOTAL PER SASARAN | 1.055.036.940 | 1.027.060.279 | 96,43 |
| | | | | | | | | TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 3,57 % | | | | | | | |
| TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 96,43 % | | | | | | | | | | | | | | | |

Sasaran 2
Meningkatnya peran parpol dan ormas dalam kehidupan berdemokrasi

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Peran Parpol dan Ormas dalam Kehidupan Berdemokrasi

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2021 | | % | Tahun 2022 | | % | Akhir RPJMD | | % |
|---------------------------|--|--------|------------|-----------|-------|------------|-----------|--------|-------------|-----------|--------|
| | | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1 | Persentase parpol dan ormas yang aktif | % | 90,64 | 90,20 | 99,51 | 90,64 | 90,90 | 100,28 | 90,64 | 90,90 | 100,28 |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | | | 99,51 | | | 100,28 | | | 100,28 |

Sasaran meningkatnya ormas yang aktif dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Persentase parpol dan ormas yang aktif. Persentase parpol dan ormas yang aktif adalah dari 81 ormas yang terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh terdapat 72 ormas yang aktif dan dari 18 partai politik yang ada di Kota Payakumbuh ada 18 partai politik yang aktif. *Aktif* mengandung makna dengan memenuhi syarat-syarat aktif yaitu :

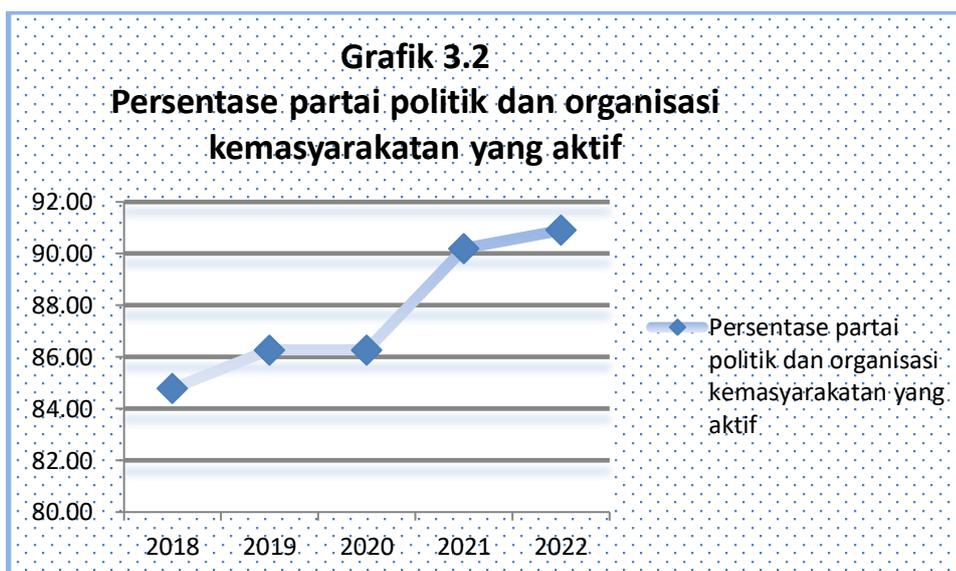
1. Mempunyai akta notaris pendirian.
2. Mempunyai kepengurusan yang masih berlaku.
3. Mempunyai kantor/sekretariat
4. Mempunyai AD/ART yang baku

Angka capaian persentase parpol dan ormas yang aktif dihitung dengan cara $90/99 \times 100\% = 90,90\%$ dari target sebesar 90,64% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,28 % atau kategori sangat baik sudah di atas target yang diperjanjikan. Capaian ini naik dari capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 90,20%. Jika dibandingkan dengan target akhir RMJD seperti dapat dilihat pada tabel 3.7 capaian tahun 2022 sudah di atas target yang ada. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD perlu ditingkatkan koordinasi dengan seluruh pengurus partai politik dan ormas, serta perlu dilakukan peningkatan pengurus partai dan ormas dengan sosialisasi dan diskusi politik.

Untuk perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.8
 Persentase Parpol dan Ormas yang aktif Tahun 2018 – 2022

| Indikator Kinerja Utama | Tahun | | | | |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase parpol dan ormas yang aktif | 84,78 % | 86,27% | 86,27% | 90,20% | 90,90% |



Capaian kinerja sasaran meningkatnya ormas yang aktif didukung oleh program Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan 3 buah sub kegiatan.

Gambaran tentang program, kegiatan, sub kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

| No | Program/Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Output | Menujang /Kurang |
|----|--|--------------------|-------------------------|--------|------------------|
| I | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 1.405.454.403 | 1.296.488.260 | | |

| | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|--|-----------|
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik | 1.405.454.403 | 1.296.488.260 | | |
| 1 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 798.457.493 | 795.904.093 | Jumlah bantuan kepada partai politik; Jumlah sosialisasi peraturan tentang politik | Menunjang |
| 2 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 600.000.000 | 494.031.947 | Jumlah fasilitasi kelembagaan atau instansi vertikal yang dilaksanakan | Menunjang |
| 3 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 6.999.910 | 6.552.220 | Jumlah monitoring yang dilakukan | Menunjang |

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya peran Parpol dan Ormas dalam kehidupan berdemokrasi disebabkan faktor pendukung sebagai berikut :

1. Rapat tim dan sosialisasi terhadap parpol dan ormas dapat berjalan sesuai rencana.
2. Pelaksanaan monitoring kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dapat terlaksana dengan baik.

Faktor penghambat kinerja sasaran meningkatnya peran Parpol dan Ormas dalam kehidupan berdemokrasi disebabkan faktor pendukung sebagai berikut :

1. Rendahnya kemampuan pengurus partai politik dan ormas dalam mengelola bantuan keuangan.
2. Seringnya terjadi pergantian pengurus baik dalam kepengurusan partai politik maupun ormas



BIMTEK BANTUAN KEUANGAN PDP



DISKUSI POLITIK



MONITORING ORMAS



BIMTEK INTELIJEN



MONEV PARPOL

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatkan peran parpol dan ormas dalam kehidupan berdemokrasi, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.10

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Parpol dan Ormas dalam Kehidupan Berdemokrasi

| No | Sasaran | Indikator | Satuan | Kinerja | | | Keuangan | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|--|--------|---------|-----------|---------------|--|---------------|---------------|-------|
| | | | | Target | Realisasi | (%) | Program | Pagu | Realisasi | % |
| 1 | Meningkatnya Ormas yang Aktif | 1.1 Persentase Parpol dan Ormas yang Aktif | % | 90,64 | 90,90 | 100,28 | 1 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 1.405.454.403 | 1.296.488.260 | 92,25 |
| RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR | | | | | | 100,28 | TOTAL PER SASARAN | 1.405.454.403 | 1.296.488.260 | 92,25 |
| TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 8,03 % | | | | | | | | | | |
| TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 91,99% | | | | | | | | | | |

Sasaran 3
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kantor Kesbangpol

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatkan tata kelola perkantoran

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2021 | | % | Tahun 2022 | | % | Akhir RPJMD | | % |
|---------------------------|--|--------|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|-------------|-----------|-----|
| | | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1 | Hasil Penilaian Akip Kesbangpol oleh Inspektorat | Nilai | A | A | 100 | A | A | 100 | A | A | 100 |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | | | 100 | | | 100 | | | 100 |

Sasaran meningkatkan tata kelola perkantoran dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Hasil Penilaian Akip Kesbangpol oleh Inspektorat.

Capaian kinerja nyata indikator Hasil Penilaian Akip Kesbangpol oleh Inspektorat adalah A (89,98) hasil penilaian dari Inspektorat Kota Payakumbuh dari target sebesar A yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 % atau sesuai target yang diperjanjikan. Capaian ini sama dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar A. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD seperti pada tabel 3.11 capaian sudah sesuai target tapi belum maksimal.

Hasil evaluasi Inspektorat Kota Payakumbuh terhadap Implementasi SAKIP Tahun 2021 pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh disarankan melakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Supaya capaian target kinerja yang diperjanjikan untuk mengukur dan menyimpulkan keberhasilan dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan(reward)
2. Supaya terdapat mekanisme dan implementasi reward and punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja
3. Supaya capaian target kinerja dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) serta untuk memberikan otorisasi dan eksekusi diteruskan atau ditundanya suatu kegiatan
4. Supaya hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment
5. Supaya Laporan Kinerja dilengkapi dengan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, perbandingan capaian tahun berjalan dengan standar nasional atau RPJMD

dan perbandingan realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.

Dari saran-saran Inpektorat di atas sudah dilakukan dan ditindaklanjuti hal-hal sebagai berikut :

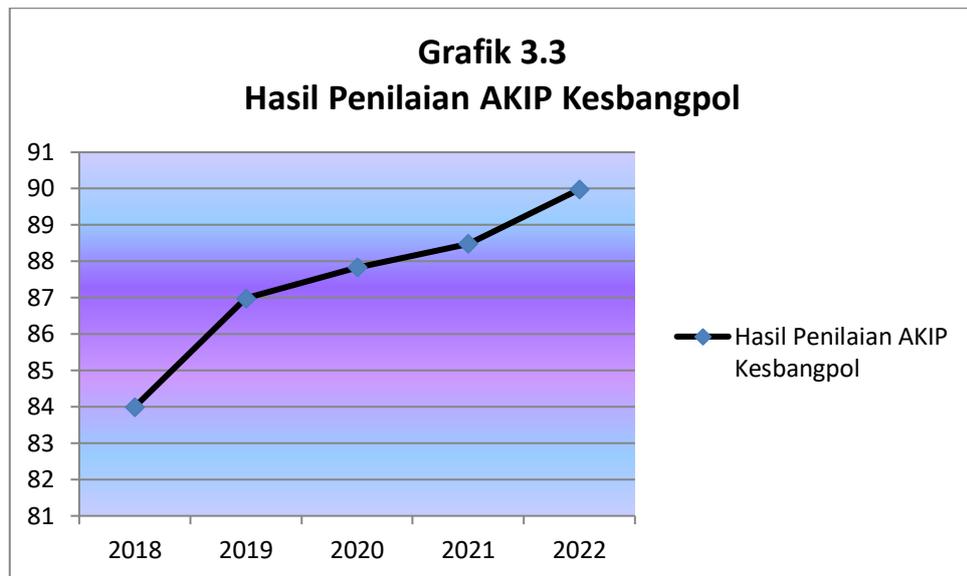
1. Tidak ada diberikannya hukuman (punishment) karena tidak ada target kinerja yang tidak tercapai.
2. Walaupun semua target kinerja tercapai tetapi diberikan sertifikat kepada PPTK yang berhasil mencapai persentase program dan kegiatan yang tertinggi dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh, yaitu Niken Agriyena, S.Sos sebagai Kasi Pembinaan Politik dan Ketentraman.
3. Laporan Kinerja telah dilengkapi dengan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja dan perbandingan capaian tahun berjalan dengan RPJMD.

Untuk perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.12

Data perbandingan Hasil Penilaian Akip Kesbangpol oleh Inspektorat Tahun 2018 - 2022

| Indikator Kinerja Utama | Tahun | | | | |
|--|-------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Hasil Penilaian Akip Kesbangpol oleh Inspektorat | A | A | A | A | A |



Capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Kantor Kesbangpol didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan 6 kegiatan dan 17 sub kegiatan.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13

Program, kegiatan, sub kegiatan, anggaran dan output yang dihasilkan

| No | Program/Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Output | Menunjang /Kurang |
|----|---|----------------------|-------------------------|--|-------------------|
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1.537.414.334 | 1.455.685.665 | | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 34.277.710 | 33.994.440 | | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 18.478.020 | 18.284.700 | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | Menunjang |
| 2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.799.690 | 15.709.740 | Jumlah laporan yang disusun | Menunjang |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.171.562.766 | 1.094.613.751 | | |
| 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.171.562.766 | 1.094.613.751 | Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya | Menunjang |

| | | | | | |
|----|--|--------------------|--------------------|--|-----------|
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 6.907.160 | 6.792.500 | | |
| 4 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 6.907.160 | 6.792.500 | Jumlah pakaian dinas yang diadakan | Menunjang |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 179.805.410 | 179.357.176 | | |
| 5 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.741.400 | 4.561.900 | Jumlah alat listrik dan elektronik yang dibayarkan | Menunjang |
| 6 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3.424.050 | 3.400.000 | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | Menunjang |
| 7 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 15.627.410 | 15.469.825 | Jumlah atk yang dibayarkan | Menunjang |
| 8 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 10.707.250 | 10.643.400 | Jumlah barang cetak yang dibayarkan; Jumlah barang yang difotocopy yang dibayarkan; jumlah buku yang dijilid yang dibayarkan | Menunjang |
| 9 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4.314.300 | 4.305.000 | Jumlah media cetak dan buku peraturan tentang keuangan yang dibayarkan | Menunjang |
| 10 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 7.570.000 | 7.569.400 | Jumlah porsi makanan yang dibayarkan | Menunjang |
| 11 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 133.421.000 | 133.407.651 | Jumlah aparatur yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menunjang |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 86.369.580 | 73.284.079 | | |
| 12 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 990.000 | 990.000 | Jumlah materai yang dibeli | Menunjang |
| 13 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 18.121.908 | 15.235.798 | Jumlah rekening yang dibayarkan | Menunjang |
| 14 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5.720.000 | 5.676.760 | Jumlah peralatan kerja yang siap pakai | Menunjang |

| | | | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|--|-----------|
| 15 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.179.380 | 53.659.760 | Jumlah bahan kebersihan dan alat pembersih yang dibayarkan; jumlah gaji pramubakti yang dibayarkan; jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan gajinya | Menunjang |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 65.850.000 | 65.366.240 | | |
| 16 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 47.850.000 | 47.494.350 | Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang dibayarkan | Menunjang |
| 17 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 18.000.000 | 17.871.890 | Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dibayarkan | Menunjang |

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatkan tata kelola perkantoran disebabkan faktor pendukung sebagai berikut :

1. Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan Kantor Kesbangpol.
2. Pelaksana kegiatan bekerja sesuai dengan time schedule yang sudah ditetapkan.
3. Kerjasama antara pengelola kegiatan, pengelola keuangan dan PA berjalan sesuai dengan aturan.
4. Pengawasan dari Atasan (PA) berjalan dengan baik.



RAPAT STAF KANTOR KESBANGPOL

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatkan tata kelola perkantoran, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.14

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Perkantoran

| No | Sasaran | Indikator | Satuan | Kinerja | | | Keuangan | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|--------|---------|-----------|-----|---|---------------|---------------|-------|
| | | | | Target | Realisasi | (%) | Program | Pagu | Realisasi | % |
| 1 | Meningkatnya tata kelola perkantoran | 1.1 Hasil Penilaian AKIP Kesbangpol oleh Inspektorat | Nilai | A | A | 100 | 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | 1.537.414.334 | 1.455.685.665 | 90.37 |
| RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR | | | | | | 100 | TOTAL PER SASARAN | 1.537.414.334 | 1.455.685.665 | 90.37 |
| TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 9.63 % | | | | | | | | | | |
| TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 90.37 % | | | | | | | | | | |

B. Realisasi Anggaran

Selama Tahun 2022 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh DPA Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 3.997.905.677,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.779.234.204.- atau dengan serapan dana APBD mencapai 94,53%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2022 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 218.671.473,-. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Pagu dan Realisasi Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2022

| No. | Misi | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat menuju kehidupan yang demokratis | 2.942.868.737 | 2.752.173.925 | 93,52 |
| 2 | Menciptakan stabilitas daerah yang kondusif | 1.055.036.940 | 1.027.060.279 | 96,43 |
| | Jumlah | 3.997.905.677 | 3.779.234.204 | 94,53 |

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh pada Tahun 2022.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.16
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kota Payakumbuh
 Tahun 2022**

| No. | Kategori | Jumlah Indikator | Presentase Capaian Kinerja | Anggaran | |
|-----------|---------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| | | | | Realisasi (Rp.) | % |
| A. | Misi 1, | | | | |
| 1 | Melebihi/Melampaui Target | 1 | 100,28 | 2.752.173.925 | 93,52 |
| 2 | Sesuai Target | 1 | 100,00 | | |
| 3 | Tidak Mencapai Target | | | | |
| | | | | | |
| B. | Misi 2, | | | | |
| 1 | Melebihi/Melampaui Target | | | 1.027.060.279 | 96,43 |
| 2 | Sesuai Target | | | | |
| 3 | Tidak Mencapai Target | 1 | 100,00 | | |

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2022 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 % atau interpretasi sangat baik

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,28% atau interpretasi sangat baik

Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sangat baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum sudah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.997.905.677,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.779.234.204.- atau dengan serapan dana APBD mencapai 94,53 %, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2022 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 218.671.473,-

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

KOTA : PAYAKUMBUH
NAMA PERANGKAT DAERAH : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | (%) |
|----|--|--|--------|-----------|--------|
| 1 | Menurunnya tingkat konflik sosial di tengah masyarakat | Persentase Penanganan Konflik Sosial yang Terjadi di Tengah Masyarakat | 100% | 100% | 100,00 |
| 2 | Meningkatnya peran parpol dan ormas dalam kehidupan berdemokrasi | Persentase Parpol dan Ormas yang Aktif | 90,64% | 90.90% | 100.28 |
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja kantor kesbangpol | Hasil penilaian AKIP Kesbangpol oleh Inspektorat | A | A | 100,00 |

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2022 : Rp. 3.997.905.677,-
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022 : Rp. 3.779.234.204,-

Payakumbuh, 31 Desember 2022

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA PAYAKUMBUH

Dipa Surya Persada, S.STP, MM
NIP. 19830208 200112 1 002

**PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|--------|
| 1 | Menurunnya tingkat konflik sosial di tengah masyarakat | Persentase Penanganan Konflik Sosial yang Terjadi di Tengah Masyarakat | 100% |
| 2 | Meningkatnya peran parpol dan ormas dalam kehidupan berdemokrasi | Persentase Parpol dan Ormas yang Aktif | 90,64% |
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja kantor kesbangpol | Hasil penilaian AKIP Kesbangpol oleh Inspektorat | A |

Payakumbuh, Oktober 2022

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PAYAKUMBUH


Dipa Surya Persada, S.STP, MM
NRP. 0830208 200112 1 002